

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kecurangan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan negatif yang dapat merugikan suatu pihak atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dari hal sederhana hingga kompleks dan terencana. Kecurangan pada sektor publik ataupun swasta dewasa ini banyak melibatkan kalangan terpelajar dan tidak jarang orang yang memiliki kedudukan dan jabatan tinggi terlibat di dalamnya. Bentuk kecurangan dapat berupa penyalahgunaan aset, penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan lain-lain yang berbentuk kejahatan ekonomi, tindakan kecurangan seperti ini disebut sebagai tindak kejahatan kerah putih (Tuanakotta, 2007)

Di Indonesia, kecurangan yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang. Hal ini diperkuat oleh adanya data pada tahun 2016 dari survei yang dilakukan oleh pengamat korupsi yaitu *Tranparency International* dalam situs nya www.transparency.org, bahwa Indonesia berada pada urutan 90 dari 176 negara dengan skor 37 dari skor tertinggi yaitu 100, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi.

Banyak kasus korupsi di Indonesia yang hanya lewat begitu saja yang dibicarakan di media elektronik maupun media massa, dengan pandangan yang beragam dari masyarakat. Namun diputuskan bebas di pengadilan, dan juga kasus yang belum menemukan titik terang dan belum diketahui secara pasti dan jelas arahnya. Korupsi yang merupakan salah satu kecurangan dapat diminimalisir dengan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengendalian internal. Auditor internal merupakan bagian dari pengendalian internal yang berfungsi untuk membantu dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Memberantas kecurangan diperlukan kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Terdapat beberapa hal yang harus auditor perhatikan, antara lain dengan mengerti serta memahami mengenai kecurangan, jenis kecurangan, karakteristik kecurangan, dan cara untuk mendeteksinya. Karakteristik atau kondisi tertentu dapat menunjukkan adanya tindak kecurangan disebut dengan *red flag*.

Pada kondisi tertentu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, bisa berasal dari sisi eksternal ataupun internal. Salah satu faktor kegagalan audit (*audit failure*) dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya skeptisme profesional auditor itu sendiri, hal ini berpengaruh terhadap kemampuan atau kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik potensi maupun tanda yang mengindikasikan adanya kecurangan (*fraud*) atau kesalahan. Auditor yang tidak menerapkan skeptisme profesional hanya akan mendapatkan salah saji yang disebabkan kekeliruan saja, dan sulit menemukan kecurangan di dalamnya, karena biasanya akan

disembunyikan oleh pelakunya. Beberapa kasus terjadinya kegagalan auditor dalam menemukan adanya kecurangan, skandal ini melibatkan akuntan publik di dalamnya seperti kasus Enron, World Com, Tyco, dan kasus-kasus lainnya yang salah satu penyebabnya karena kurangnya sikap skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Skeptisme profesional merupakan sikap seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang ada (SA Seksi 230). Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak mudah untuk mempercayai penjelasan klien yang berhubungan dengan bukti audit. Adanya sikap skeptisme profesional akan lebih mampu menganalisis adanya tindak kecurangan pada laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses auditing selanjutnya.

Hasil penelitian Katty, Martha, dan David (2008), peneliti menekankan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisme yang lebih tinggi lebih mudah dalam menganalisa dan mendapatkan bukti serta bisa mendapatkan penjelasan alternatif lain dibandingkan dengan auditor yang memiliki sikap skeptisme yang lebih rendah. Peneliti juga menjelaskan bahwa sikap skeptis auditor adalah hal yang melekat dalam diri secara individual.

Selain harus menerapkan sikap skeptisme profesional auditor dituntut juga untuk memiliki sikap independensi yang tinggi. Auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap tugasnya, terlebih lagi saat mendeteksi adanya tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada dalam tekanan dari pihak lain.

Saat melakukan proses audit, auditor harus mempertahankan sikap independensi agar auditor tidak memihak pada siapapun sehingga dapat bersifat objektif dan bertindak adil dalam memberikan opini ataupun kesimpulannya. Bila auditor tidak menerapkan sikap independensi maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tersebut.

Auditor internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dimana BPKP merupakan salah satu ruang lingkup dalam APIP pada instansi pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPKP berwenang sesuai dengan peraturan presiden non Undang-undang, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.64 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian. Auditor yang bekerja di BPKP memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjadi salah satu

APIP, alasan mengapa dalam penelitian ini memilih BPKP sebagai objek, karena selain melakukan pengawasan keuangan pemerintah, BPKP juga mengelola program lintas sektoral yang difokuskan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini menjadi ketertarikan untuk meneliti apakah auditor yang bekerja dalam BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugasnya secara profesional, dimana hal tersebut dilihat dari kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti pengaruh skeptisme profesional dan independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul, **“PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD) PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3.Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan topik yang dibahas tidak meluas maka perlu dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Adapun pembatasan lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) adalah beban kerja, pengalaman kerja, skeptisme profesional, independensi auditor, kompetensi, dan faktor-faktor lainnya. Namun, pada penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan variabel skeptisme profesional dan independensi auditor sebagai variabel independen.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 35 auditor dari total 70 auditor yang merupakan kebijakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Rd. Dewi Suciati (2016).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang *auditing*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti dapat menambah wawasan khususnya tentang pengaruh sikap skeptisme profesional dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

b. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penerapan sikap skeptisme profesional dan independensi auditor dalam kondisi seperti apapun yang ditunjukkan melalui keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai saran untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam pengendalian internal, khususnya dalam pencegahan dan pendeteksian tindak kecurangan.

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis akan memaparkan dalam lima bab penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mencakup latar belakang masalah yang memuat rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Mengutarakan landasan teori yang merupakan formulasi universal dari kajian pustaka yang dirangkum untuk membangun suatu kerangka pemikiran hingga muncul hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari definisi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Membahas analisis terhadap faktor yang diteliti dengan cara menyebar kuesioner dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Membuat kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berbagai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta saran.